

## COUNTRY BRIEF



# SEKILAS TENTANG AGENDA PEREMPUAN, PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DI INDONESIA

Photo: UN Women/ Satu Bumi Jaya

## Konteks Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (Women, Peace, and Security) di Indonesia

Negara Indonesia telah menyepakati bahwa masyarakat yang stabil, adil, dan damai tidak bisa dicapai tanpa mengakui dan menggarisbawahi peran perempuan dalam membangun perdamaian, mencegah konflik, dan menghadapi tantangan keamanan baru, seperti perubahan iklim dan ekstremisme kekerasan. Hal ini ditunjukkan melalui hadirnya Rencana Aksi Nasional (RAN) Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Women, Peace, and Security / WPS) yang merupakan adopsi dari kerangka global Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Women, Peace, and Security / WPS), Indonesia telah menerjemahkan agenda WPS melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Konflik Sosial (P3AKS)<sup>1</sup>, dan diikuti dengan Permenko Kesra No. 8 tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional P3AKS (RAN P3AKS). RAN tersebut mencakup tiga pilar: pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan, serta partisipasi perempuan dan anak.

RAN P3AKS kedua (2020-2025) disahkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) No. 5 Tahun 2021 setelah Konsultasi Digital Nasional Online yang dilakukan untuk mengevaluasi implementasi RAN P3AKS. RAN kedua memasukkan isu-isu keamanan baru dan konflik non-tradisional yang menjadi prioritas untuk Indonesia; pencegahan ekstremisme kekerasan, intoleransi dan radikalisme, sengketa lahan dan maraknya misinformasi dan disinformasi, termasuk berita bohong dan ujaran kebencian secara online.

Indonesia merupakan salah satu di antara negara anggota ASEAN lainnya yang telah mengakui peran perempuan dalam pencegahan konflik, termasuk pencegahan dan penanganan ekstremisme kekerasan. Beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menginternalisasi dan mengharmonisasi agenda WPS melalui implementasi RAN Pencegahan dan Penanganan ekstremisme kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024 (RAN PE), yang disahkan melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 yang dimotori oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). RAN PE memasukkan dimensi gender dan HAM dalam pencegahan dan penanganan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Di level ASEAN, BNPT juga memimpin penyusunan Rencana Kerja ASEAN untuk Pencegahan dan Penanganan Radikalisme dan ekstremisme kekerasan 2019-2024 (Bali Work Plan on PCRVE), yang menggunakan pendekatan responsif gender dalam penanganan ekstremisme kekerasan dan pendekatan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai badan ASEAN untuk memastikan Bali Work Plan on PCRVE mempertimbangkan perspektif gender dan kebutuhan perempuan dalam pencegahan ekstremisme kekerasan, seperti Komisi ASEAN tentang Perempuan (ASEAN Committee on Women) dan Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)).

Salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia adalah peningkatan peran perempuan dalam perdamaian internasional.<sup>2</sup> Di ASEAN, Indonesia merupakan penyumbang pasukan terbesar dalam misi pemeliharaan

1. Rencana Aksi Nasional tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS)

2. Konsultasi ini diinisiasi oleh AMAN Indonesia dan melibatkan pemangku kepentingan WPS baik dari pemerintah, komunitas, masyarakat sipil yang bekerja di akar rumput. Konsultasi ini melibatkan lebih dari 200 perwakilan masyarakat sipil dari 24 provinsi di Indonesia.

3. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/1821/view/twenty-years-of-women-peace-and-security-agenda-indonesian-women-continue-to-contribute-to-world-peace>

4. <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>

# PEREMPUAN, PERDAMAIAN, DAN KEAMANAN DI INDONESIA

perdamaian PBB dan menempati peringkat kesembilan penyumbang pasukan terbesar secara global. Pemerintah mengerahkan hampir 3.000 personel berseragam<sup>3</sup>, namun hanya 5,5 persen jumlah perempuan. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Di bawah kepemimpinan Indonesia pada tahun 2020, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 2538 tentang perempuan dan pemeliharaan perdamaian – resolusi pertama mengenai pemeliharaan perdamaian yang sepenuhnya ditujukan untuk perempuan. Resolusi tersebut menyerukan kepada negara-negara anggota dan PBB untuk memperkuat upaya kolektif mereka dalam mendorong keterlibatan perempuan militer dan sipil secara penuh, efektif dan bermakna dalam operasi pemeliharaan perdamaian di semua tingkatan dan posisi.<sup>4</sup>

## Tantangan

Terlepas dari komitmen nasional dan dukungan kementerian dalam memajukan agenda WPS, masih ada beberapa hambatan bagi Indonesia untuk mengatasi dampak gender dari tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional di kawasan ini. Dampak multidimensi pandemi COVID-19 dan meningkatnya disinformasi online telah memperburuk ketimpangan gender dan mendorong ketegangan, perpecahan, dan konflik sosial yang sudah ada sebelumnya. Sementara itu, sebagai negara yang sangat rentan terhadap bencana dan perubahan iklim, perempuan dan anak perempuan menghadapi resiko keamanan iklim yang lebih tinggi di Indonesia. Hambatan budaya dan struktural, seperti nilai-nilai patriarki dan doktrin agama, juga menjadi hambatan besar dalam mendorong partisipasi perempuan di sektor keamanan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, UN Women Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, mitra pembangunan internasional, dan komunitas untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mendorong kesetaraan gender dan perdamaian berkelanjutan.

## Keja-Kerja UN Women Indonesia untuk Implementasi Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan

### Implementasi RAN P3AKS untuk memajukan agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan

UN Women Indonesia mendukung implementasi dua generasi RAN Perlindungan dan Pemberdayaan



**21%** kursi parlemen diduduki  
oleh perempuan



**158**

Perempuan pasukan penjaga  
perdamaian yang bertugas di misi PBB  
di tahun 2021



**570+** Perempuan pasukan  
penjaga perdamaian dikerahkan sejak  
tahun 1999



**x3** Jumlah perempuan pasukan  
penjaga perdamaian  
meningkat tiga kali lipat  
dari 59 di tahun di tahun 2017  
menjadi 183 di tahun 2021



**6%** polisi perempuan di tahun 2019

Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Indonesia. Sejak RAN P3AKS disahkan pada tahun 2014, UN Women Indonesia telah mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam peningkatan kapasitas, advokasi, serta pembentukan dan penguatan mekanisme akuntabilitas RAN. Dukungan UN Women mencakup penguatan keterampilan dan kapasitas Kelompok Kerja P3AKS, termasuk pemantauan dan pelaporan implementasi RAN, serta mendorong kelompok perempuan, perempuan muda dan perempuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara bermakna dan menyusun rencana pembangunan perdamaian di lokal yang lebih adil dan inklusif.

Selain itu, UN Women telah memberikan bantuan teknis kepada Kemen PPPA untuk memajukan agenda WPS di tingkat nasional dan daerah, serta memperkuat infrastruktur Kelompok Kerja P3AKS untuk mendorong sinergi yang efektif antara pembuat kebijakan dan masyarakat sipil dalam implementasi RAN P3AKS kedua, melalui lokakarya perencanaan strategis yang dirancang untuk mengidentifikasi prioritas dan pelatihan tentang

perlindungan hak-hak perempuan dan anak selama konflik sosial.

UN Women Indonesia juga mendukung sekretariat P3AKS untuk menyusun alat monitoring dan evaluasi implementasi RAN P3AKS serta menyiapkan pelaporan bersama dengan tim Koordinasi Pusat.

UN Women juga berkontribusi dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam RAN dan upaya-upaya lainnya dalam pencegahan konflik. Kedua RAN ini mengakui pentingnya peran masyarakat sipil dan aktor non-tradisional, termasuk organisasi perempuan, kelompok pemuda dan pemimpin agama, dalam pencegahan konflik, termasuk pencegahan esktrimisme kekerasan.

UN Women bermitra dengan Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia untuk pemberdayaan pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijakan WPS dan kerangka kerjanya di tingkat lokal dan provinsi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan pemuda dalam pencegahan, penyelesaian dan pemulihan konflik. Di tingkat nasional, UN Women mendukung koordinasi yang efektif melalui bantuan teknis kepada kementerian terkait dalam implementasi dan sosialisasi RAN. Melalui advokasi bersama dan peningkatan kapasitas, kami berupaya untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas RAN WPS agar dapat mengatasi dimensi gender dalam konflik sosial dengan lebih baik.

### **Pendekatan berbasis komunitas untuk membangun kohesi sosial dan mencegah konflik**

Menyadari peran aktif perempuan dalam pembangunan perdamaian dan pegiat perdamaian dalam konflik sosial dan komunal sepanjang sejarah Indonesia, UN Women Indonesia mendukung peningkatan kapasitas dan pemberdayaan komunitas lokal, terutama perempuan dan anak perempuan, untuk mendorong kohesi sosial, membangun ketangguhan dari berbagai ancaman, serta penanganan ekstremisme kekerasan. Sejak 2017, UN Women telah berkolaborasi dengan Wahid Foundation untuk mendukung pendekatan responsif gender dalam pencegahan konflik untuk menciptakan komunitas

yang aman dan damai. Inisiatif Desa Damai mendorong pemberdayaan agar suara perempuan didengar dalam proses pengambilan keputusan di level komunitas untuk meningkatkan pencegahan konflik dan menguatkan kohesi sosial, termasuk kesempatan penguatan ekonomi dan peluang kerja. Inisiatif ini juga mendorong adanya peningkatan kapasitas perempuan dan komunitas dalam mengembangkan rencana aksi lokal dan mengenali tanda-tanda peringatan awal intoleransi dan radikalisasi melalui dialog lintas iman dan komunitas, serta keterlibatan kelompok pemuda dan multipihak di tingkat komunitas/desa. Pada pertengahan tahun 2023, 22 desa telah mendeklarasikan diri sebagai “Desa Damai”, yang artinya anggota masyarakat berkomitmen untuk melindungi dan memupuk toleransi dan perdamaian di komunitasnya, mulai dari membangun perdamaian dari dalam keluarga. Untuk menjadi Desa Damai, maka masyarakat harus mencapai:

1. Masyarakat menyusun dan melaksanakan peraturan yang memastikan lingkungan hidup yang aman dan harmonis;
2. Masyarakat dididik mengenai nilai-nilai universal, termasuk perdamaian, kesetaraan gender, toleransi dan keadilan dalam masyarakat yang multicultural, dimulai dari tingkat rumah tangga;
3. Perempuan berperan aktif dalam semua sektor di desa, termasuk administrasi, keamanan, ekonomi dan pendidikan;
4. Masyarakat memahami dan mengamalkan nilai-nilai solidaritas, kohesi social, dan perdamaian;
5. Masyarakat memiliki sistem peringatan dini untuk mencegah kekerasan, radikalisme, konflik sosial dan terorisme;
6. Masyarakat mempunyai mekanisme intervensi konflik untuk menjamin pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi korban kekerasan;
7. Masyarakat memiliki akses terhadap kegiatan seni dan budaya berbasis komunitas untuk merefleksikan dan meningkatkan kerja sama;
8. Masyarakat mempunyai sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan kolektif, seperti balai atau ruang public lainnya untuk pertemuan bersama;
9. Masyarakat memiliki mekanisme akuntabilitas untuk melaporkan dan mendokumentasikan kemajuan implementasi indikator Desa Damai.



Pemerintah Indonesia mengakui inisiatif Desa Damai sebagai model utama dalam pilar pencegahan RAN-PE, yang perlu direplikasi di desa lainnya. UN Women akan terus berbagi strategi dan pembelajaran dengan Kemen PPPA mengenai inisiatif 'desa ramah perempuan dan peduli anak' untuk lebih mengintegrasikan perspektif gender ke dalam tata kelola desa, pembangunan, partisipasi inklusif dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan koheesi sosial dan perdamaian. Inisiatif Desa Damai saat ini telah dikembangkan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.



**Buku Cerita Desa Damai**  
<http://unwo.men/mytx50PAemB>

### **Hubungan Antara Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Women, Peace, and Security) dengan Agenda Pemuda, Perdamaian, dan Keamanan (Youth, Peace, and Security)**

Mencermati agenda pemuda, perdamaian, dan keamanan (YPS) yang menekankan pentingnya peran pemuda dalam pencegahan konflik dan mewujudkan perdamaian berkelanjutan, UN Women Indonesia juga fokus pada hubungan YPS dan WPS untuk memperkuat partisipasi pemuda, terutama perempuan muda, dalam pencegahan, penyelesaian, dan pemulihan konflik yang responsif gender dan usia. Perpaduan agenda YPS dan WPS memberikan peluang untuk menciptakan ruang yang lebih inklusif untuk mengatasi berbagai ancaman keamanan yang secara tidak proporsional berdampak pada perempuan dan generasi muda, seperti ujaran kebencian online.

UN Women berkolaborasi dengan AMAN Indonesia dalam mempertemukan para aktor muda pembangun perdamaian, untuk saling berbagi cerita dan wawasan mereka dalam inisiatif perdamaian melalui serangkaian dialog dan forum perdamaian dengan menggunakan lensa gender. UN Women memberikan pelatihan literasi media digital untuk membangun kapasitas generasi muda dalam melawan narasi intoleran dan ekstremis, serta meningkatkan kemampuan untuk mengatasi berbagai dampak konflik dan rasa tidak aman yang dialami oleh berbagai kelompok generasi muda.

Di Desa Damai, UN Women bekerja sama dengan Wahid Foundation untuk mendorong perempuan muda memimpin dan mengelola kegiatan komunitas dan

mengekspresikan nilai-nilai perdamaian. Selama masa COVID-19, kelompok pemuda di Desa Damai menghasilkan ide-ide kreatif, termasuk meluncurkan saluran media sosial, seperti Proyek Lokal di desa Candirenggo di Jawa Timur, untuk memajukan kesetaraan gender dan keberagaman. Proyek ini menyediakan kursus untuk mendukung kesejahteraan mental anggota masyarakat selama COVID-19, dan memulai dialog antaragama untuk mendorong keharmonisan dan toleransi.

### **Hubungan perdamaian-kemanusiaan dan peningkatan ketahanan masyarakat**

Di negara yang beragam yang berpotensi terjadi ketegangan sosial dan bencana alam serta memiliki lebih dari 80.000 desa, sangat penting untuk menciptakan praktik ketahanan masyarakat yang responsif gender dan memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan memiliki kapasitas untuk menghadapi krisis yang disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi atau bencana. Untuk melindungi dan memberdayakan perempuan di lingkungan yang terkena dampak bencana dan konflik, UN Women Indonesia akan mengembangkan intervensi yang berkontribusi terhadap implementasi kebijakan utama yang relevan dengan pengurangan risiko bencana, pencegahan ekstremisme kekerasan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Berdasarkan model Desa Damai, proyek ini akan memperkuat ketahanan masyarakat dan mengurangi kerentanan di daerah darurat dan terkena dampak konflik dengan menghubungkan kemanusiaan-pembangunan-perdamaian, di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

## Partisipasi bermakna perempuan pembangun perdamaian Indonesia

Salah satu fokus Program WPS UN Women adalah meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam perdamaian. Saat ini kami sedang membangun aliansi dengan perempuan anggota parlemen, lembaga penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri untuk memberikan bantuan teknis dan memulai upaya untuk mendorong partisipasi bermakna perempuan dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Melalui pelatihan, pertukaran informasi dan lokakarya peningkatan kapasitas, kami bermaksud untuk menyoroti kontribusi perempuan yang kurang dihargai dalam pencegahan konflik, pemeliharaan perdamaian, penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian di tingkat internasional.

## Mitra Strategis UN Women

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kaukus Parlemen Perempuan
- Organisasi masyarakat sipil dan organisasi perempuan (Wahid Foundation, Asian Muslim Action Network – AMAN Indonesia)
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Polisi Republik Indonesia

## Kontak Tim Perempuan Perdamaian dan Keamanan UN Women Indonesia

### Ryce Chanchai

Spesialis Tata Pemerintahan Perempuan Perdamaian dan Keamanan ASEAN / Kepala Program Regional  
[ruangkhao.chanchai@unwomen.org](mailto:ruangkhao.chanchai@unwomen.org)

### Hosianna Rugun Anggreni

Analisis Program Tata Pemerintahan, Perempuan, Perdamaian dan Keamanan  
[hosianna.anggreni@unwomen.org](mailto:hosianna.anggreni@unwomen.org)

### Xinyue Gu

Analisis Program Perempuan, Perdamaian dan Keamanan  
[xinyue.gu@unwomen.org](mailto:xinyue.gu@unwomen.org)